

Debat Tanpa Adu Debat

Oleh: Hendra Kurniawan

MASA kampanye calon presiden dan calon wakil presiden sudah dimulai sejak tanggal 4 Juni 2014. Meskipun tidak seramai hingar-bingar kampanye pemilu legislatif, namun kampanye pemilihan presiden lebih menarik untuk disimak. Melalui pilpres rakyat akan memilih pemimpin tertinggi yang akan menentukan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan. Artinya hasil pilpres akan memberi pengaruh yang jauh lebih signifikan daripada pileg. Dalam pilpres kali ini rakyat hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Meskipun hanya dua pilihan, namun untuk memilih salah satunya memang bukanlah hal yang mudah. Kedua pasangan ini sama-sama memiliki kemungkinan besar untuk menang. Keduanya sama-sama memiliki basis massa yang kuat. Harus diakui sebagai manusia biasa tentu mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini seharusnya disikapi dengan bijak oleh masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Jadi patut disayangkan apabila sampai saat ini berbagai bentuk kampanye negatif terus menerpa kedua pasangan ini meskipun dengan kadar yang berbeda. Rasa-rasanya sungguh sulit membuat masyarakat kita benar-benar cerdas dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja dari calon yang diusung. Kampanye bukan ajang untuk menjelek-jelekkan dan *nggrenengi* pihak lain dengan tujuan menjatuhkan. Salah satu cara kampanye

capres-cawapres yang efektif memang dengan menyelenggarakan debat. Tidak perlu lagi *grenang-greneng* tidak tentu arah dan membicarakan berbagai hal yang kebenarannya masih dipertanyakan. Dalam ajang debat semua hal yang belum jelas dapat diperjelas, yang perlu diketahui dapat ditanyakan, dan yang dianggap tidak benar dapat diluruskan.

Untuk itu, rakyat perlu dilibatkan secara aktif dalam acara debat capres-cawapres, misalnya dengan membuka dialog interaktif yang melibatkan pemirsa di rumah untuk bertanya secara langsung. Melalui debat yang baik dan mengena maka rakyat yang menyaksikan akan memperoleh pandangan yang lebih gamblang mengenai sosok, gagasan, dan program kerja capres-cawapres yang berlaga.

Gagal debat

Hari Senin 9 Juni 2014 di Balai Sarbini, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan debat perdana capres-cawapres dengan tema *Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih, dan Penegakan Hukum*. Juga pada hari Minggu 15 Juni 2014 kemarin di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta diselenggarakan debat kedua yang diikuti oleh capres tanpa cawapres. Tema debat kedua ini yaitu *Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*.

Dari kedua debat yang telah dilaksanakan itu jika diamati dari segi komunikasi, ada capres yang terlihat pandai berbicara dan berpidato layaknya seorang demagog, namun ada pula yang tampil dengan bahasa sederhana dan cenderung hemat

dalam berbicara. Akan tetapi bukan persoalan komunikasi saja, yang jauh lebih penting ialah esensi dari gagasan-gagasan yang mereka sampaikan. Jangan sampai pemaparan visi misi hanya berkutat pada tataran konseptual belaka yang bersifat normatif dan belum menyentuh hal-hal konkret yang implementatif terkait dengan solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Dalam dua kali debat yang telah diselenggarakan tersebut ada hal mendasar yang perlu dikritisi pula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian debat ialah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat mengedepankan dialog yang baik dan santun. Tanpa dialog maka tidak dapat disebut sebagai debat. Selain itu dalam perdebatan juga semestinya ada upaya untuk berargumentasi guna meyakinkan bahwa opininya yang lebih baik. Menjadi keliru jika yang terjadi justru pemberian dukungan dan persetujuan yang memperkuat pendapat lawan seperti yang terjadi baik dalam debat pertama maupun kedua kemarin.

Debat juga bukan diskusi karena tidak menghasilkan kompromi. Peserta debat harus berbicara secara meyakinkan, mendengarkan berbagai pendapat yang berbeda, dan di akhir debat dapat saling menghargai perbedaan yang ada. Untuk itu, penyampaian argumen harus didasari oleh data dan fakta yang logis, benar, dan akurat. Sebagai capres maupun cawapres

tentu akan menjadi sorotan, tampak konyol apabila gagasan-gagasan yang disampaikan justru kontradiksi dengan kenyataan sebenarnya. Jangan sampai pernyataan-pernyataan itu menjadi sebuah retorika belaka yang bombastis dan bertolak belakang dengan fakta.

Hal lain yang patut disayangkan ialah penampilan moderator dalam debat pertama maupun kedua yang tidak maksimal. Padahal peran dan performa moderator sangat penting dalam mengatur jalannya diskusi. Moderator harus netral, tidak memihak, luwes, terampil, dan mampu membangkitkan gairah debat. Barangkali presenter acara televisi seperti Najwa Shihab, Karni Ilyas bahkan Denny Chandra justru dapat lebih menghidupkan suasana dan membawa perdebatan lebih gayen apabila mereka dipasangi sebagai moderator. Sekiranya perlu juga KPU mempertimbangkan usulan ini.

Sasaran debat capres-cawapres untuk menggaet *swing voter* agar dapat menentukan pilihannya secara mantap terancam gagal. Dalam dua kali debat yang terjadi bukan dialog dan perdebatan namun monolog yang kompromistis. Padahal debat merupakan kesempatan untuk adu visi misi dan program kerja agar masyarakat semakin yakin dalam menentukan pilihan yang tepat menurut hati nuraninya dan bukan atas dasar emosional belaka. Masih ada tiga jilid debat capres-cawapres yang akan diselenggarakan. Semoga menjadi perdebatan yang lebih mengena dan bermakna, bukan formalitas kampanye belaka. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.